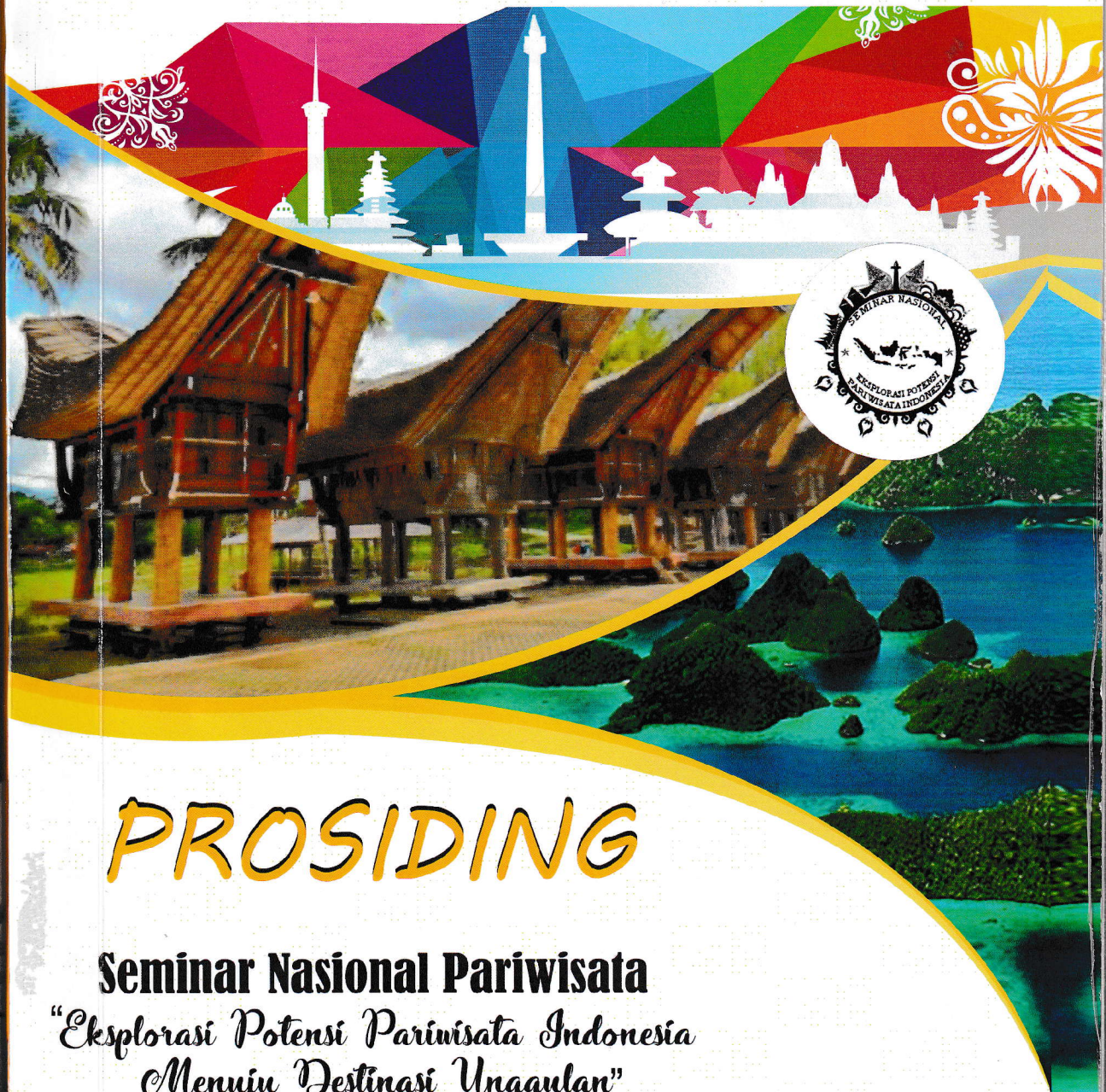




pesona  
indonesia



# PROSIDING

**Seminar Nasional Pariwisata**  
*"Eksplorasi Potensi Pariwisata Indonesia  
Menuju Destinasi Unggulan"*

Four Point By Sheraton, Makassar  
9 Mei 2018

[www.seminarmkh.wordpress.com](http://www.seminarmkh.wordpress.com)

Organized by :



POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR





*“Every time we travel, we become part of a global movement that has the power to drive positive change for our planet and all people”*

*Talib Rifai. UNWTO Secretary General*

[www.seminarmkh.wordpress.com](http://www.seminarmkh.wordpress.com)

ISBN 978-602-51991-0-3



9 786025 199103



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL PARIWISATA**  
**EKSPLORASI POTENSI PARIWISATA INDONESIA**  
**MENUJU DESTINASI UNGGULAN**

**EDITOR:**

**Ilham Junaid, M.Hum., Ph.D**  
**Muh. Arfin M. Salim, M.Pd., Ph.D**

**PENERBIT/PENCETAK:**

Politeknik Pariwisata Makassar  
Jl. Gunung Rinjani, Metro Tanjung Bunga, Kota Mandiri  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224  
Telp./Faks. (0411) 838456  
E-mail: [info@poltekipar-makassar.ac.id](mailto:info@poltekipar-makassar.ac.id)

Hak cipta pada penulis

Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh direproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72:**

**Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing dengan singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **Politeknik Pariwisata Makassar**

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraan seminar nasional dengan tema 'Eksplorasi Potensi Pariwisata Indonesia Menuju Destinasi Unggulan'. Dunia mengakui bahwa Indonesia adalah Negara besar dengan luas wilayah dan potensi pariwisata yang patut dibanggakan. Potensi pariwisata Indonesia patut dikelola secara professional agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyatnya secara berkelanjutan.

Politeknik Pariwisata Makassar sebagai institusi pendidikan tinggi pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menghasilkan insan-insan pariwisata yang mampu mengelola potensi pariwisata Indonesia. Penyelenggaraan seminar nasional yang dilaksanakan oleh prodi MKH merupakan salah satu wujud peran Politeknik Pariwisata Makassar dalam mendorong pengelolaan potensi pariwisata secara professional. Kegiatan akademik sangat dibutuhkan untuk membantu para stakeholder pariwisata memahami potensi yang dimiliki dan bagaimana potensi tersebut seharusnya dikelola untuk mendukung Indonesia menjadi destinasi unggulan. Terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang membantu penyelenggaraan seminar nasional ini.

**Salam Pesona Indonesia,**

**Makassar, 9 Mei 2018**

**Direktur,**

**Dr. H. Muhadjir Suni, M.Pd.**



# Sambutan Ketua Program Studi MKH

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraan seminar nasional dengan tema 'Eksplorasi Potensi Pariwisata Indonesia Menuju Destinasi Unggulan'. Penyelenggaraan seminar nasional ini merupakan aplikasi nyata dari pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar program studi Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan (Prodi MKH). Prodi MKH akan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang pendidikan. Pelaksanaan event secara profesional merupakan harapan dari mahasiswa sebagai pelaksana event. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan.

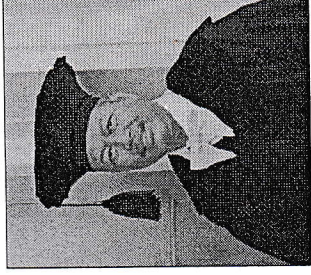
Atas nama Prodi MKH, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu pelaksanaan Seminar Nasional 2018. Khususnya para mahasiswa semester 4 (empat) prodi MKH. Semoga dengan pelaksanaan Event Seminar Nasional ini dengan metode *conference* (Model) dapat memahami dan mengatasi bagaimana tata cara dan metode penyelenggaraan event *conference* yang sebenarnya dan dapat mengangkat potensi pariwisata Indonesia semakin dikenal dan mampu mendorong Indonesia menjadi destinasi unggulan dunia.

Makassar, 09 Mei 2018

Amiruddin Hamzah, S.Pd., M.Hum.

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL PARIWISATA  
'EKSPLORASI POTENSI PARIWISATA INDONESIA  
MENUJU DESTINASI UNGGULAN'**

**Keynote Speakers:**



**Prof. Dr. Muhammad Baiquni, M.A.**  
Ketua Program Master dan Doktor Kajian Pariwisata dan Guru  
Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



**H. A. Musaffar Syah**  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan  
Provinsi Sulawesi Selatan

**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL PARIWISATA**  
**'EKSPLORASI POTENSI PARIWISATA INDONESIA**  
**MENUJU DESTINASI UNGGULAN'**

**POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**  
**2018**

**EDITOR:**

**Ilham Junaid, M.Hum., Ph.D**  
**Muh. Arfin M. Salim, M.Pd., Ph.D**



## Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraan seminar nasional dengan tema 'Eksplorasi Potensi Pariwisata Indonesia Menuju Destinasi Unggulan'. Indonesia sebagai destinasi wisata memiliki potensi wisata yang besar yang merupakan modal pembangunan bangsa. Dengan potensi pariwisata tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat serta pemanfaatan potensi secara berkelanjutan.

Prosiding seminar ini merupakan kumpulan karya tulis para *contributer* (presenter) pada kegiatan seminar di Hotel Four Point Makassar, tanggal 09 Mei 2018 yang dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar program studi Manajemen Bisnis Konvensi dan Perhelatan. Karya tulis para penulis pada kegiatan seminar ini menunjukkan banyaknya potensi pariwisata di seluruh wilayah Indonesia yang memerlukan eksplorasi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata unggulan. Semoga prosiding seminar ini menjadi rujukan ilmiah bagi para *stakeholder* ataupun penentu kebijakan (*policy maker*) dalam membangun pariwisata Indonesia.

Makassar, 09 Mei 2018  
Editor



## DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar.....	i
Sambutan Ketua Program Studi Manajemen Konvensi dan Perhelatan.....	ii
Keynote Speaker.....	iii
Editor.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vi
Bauran Pemasaran Gowa <i>Discovery Park</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Sulawesi Selatan <b>A. Ade Fitriia</b> .....	1
Optimalisasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan di Rammang-Rammang, Kabupaten Maros: Perspektif Akademisi <b>Agustina</b> .....	8
Pengaruh Novelty Terhadap Kepuasan Destinasi Pariwisata di Makassar <b>Ahmad Ab</b> .....	18
Pengembangan Kawasan Agrowisata Di Kabupaten Bantaeng: Studi Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat <b>Aldilla Ramadhania Maronie</b> .....	31
Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan ( <i>Sustainable Tourism</i> ) di Pulau Liukang Loe, Kabupaten Bulukumba <b>Alsha Eka Damayanti</b> .....	41
Citra Tana Toraja Sebagai Destinasi Program Incentive Dalam Rangka Meningkatkan Wisata MICE Di Sulawesi Selatan <b>Amiruddin Hamzah</b> .....	54
Politik dan Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pasangkayu <b>Anggi Anggriani</b> .....	79
Analisis Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pengelolaan Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Sulawesi Selatan <b>Andi Hasbi</b> .....	89
Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Desa Lakkang Sebagai Desa Wisata di Kota Makassar <b>Andi Maulidya</b> .....	111

Efektifitas Daya Tarik Wisata Permandian Alam Eremerasa di Kabupaten Bantaeng: Studi Dampak Ekonomi dan Lingkungan <b>Rhha Sulackah.....</b>	<b>236</b>
Penerapan Promosi Digital Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja <b>Renold.....</b>	<b>245</b>
Optimalisasi Potensi Pulau Kayangan Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Kota Makassar Berdasarkan Konsep 5A <b>Rosmalasari Rahmat Wijaya.....</b>	<b>272</b>
Penerapan Konsep Ekowisata di Lembah Hijau Camping Ground Area <b>Mike Julietta Wienarsi.....</b>	<b>282</b>
Konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT) Desa Wisata Pulau Kapota di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara <b>Nilu Halimah.....</b>	<b>290</b>
Komitran Masyarakat dan Pemerintahan Dalam Mengembangkan Pantai Apparalang di Kabupaten Bulukumba <b>Isud Nurul Rahmadani Hatta.....</b>	<b>299</b>
Strategi Pengembangan Pantai Sampoang Sebagai Daya Tarik Wisata Bahari di Kabupaten Bulukumba <b>Vinsky Fujiati Aqsary.....</b>	<b>307</b>
Potensi Pengembangan Wisata Halal di Kawasan Kota Tua Tosora Kabupaten Wajo <b>Fadhil Surur dan Nurul Wahdaniyah.....</b>	<b>316</b>
Tradisi "Erong" Toraja Sebagai Sumber Daya Pariwisata (Studi Etnografi) <b>Masri Ridwan.....</b>	<b>329</b>
Pengelolaan Delta Lakkang Berbasis Ekowisata Dengan Pendekatan Holistik: Studi Etnografi <b>Moh. Zainuddin Badollahi.....</b>	<b>349</b>
Variasi Istilah Akomodasi Wisata di Kawasan Timur Indonesia: Studi Komparatif Wakatobi dan Bulukumba <b>Ilham Junaid.....</b>	<b>363</b>
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Losari Water Front di Kota Makassar <b>Uffisari.....</b>	<b>375</b>

Papan Pariwisata Berbasis Masyarakat ( <i>Community-Based Tourism</i> ) di Samalona Makassar <b>Elisabeth Lianto.....</b>	<b>120</b>
Kelayakan Bendungan Ponre-Ponre Sebagai Daya Tarik Wisata Dalam Ktif Pemasaran <b>anti.....</b>	<b>128</b>
n Atribut Destinasi Dalam Mempengaruhi Kepuasan dan Intensi u Wisatawan yang Berkunjung di Kota Makassar ( <i>The role of tion attributes in fuencing the tourist satisfaction and tourist future or intention visited Makassar</i> ) <b>an Zahirulhaq.....</b>	<b>141</b>
i Pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa di Daya Tarik Bendungan Kampili <b>Permata Sari.....</b>	<b>159</b>
Air Terjun Takapala Dalam Mendukung Wisata Alam Kabupaten l.....	<b>168</b>
i Dampak Reklamasi Center Point Of Indonesia (CPI) Terhadap ata Kota Makassar <b>Ayu Sendaris dan Ilham Junaid.....</b>	<b>179</b>
Pemasaran di Daya Tarik Wisata Borpista Desa Rannaloe Kabupaten ulawesi Selatan <b>uspitasari.....</b>	<b>192</b>
asyarakat Dalam Mendukung Penerapan Konsep Ekowisata di Desa akkang <b>isyah.....</b>	<b>200</b>
Penerapan Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di i Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan <b>usna .....</b>	<b>209</b>
Meningkatkan Minat Wisatawan ke Daya Tarik Pulau Cambang- g Kabupaten Pangkep <b>Utah Sari.....</b>	<b>226</b>



## **VARIASI ISTILAH AKOMODASI WISATA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA: STUDI KOMPARATIF WAKATOBI DAN BULUKUMBA**

**Ilham Junaid**

Politeknik Pariwisata Makassar

Jl. Gunung Rinjani, Metro Tanjung Bunga, Kota Mandiri, Sulawesi Selatan

Email: illank77@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Setiap bentuk akomodasi memiliki bentuk dan jenis layanan yang berbeda yang diharapkan berdampak positif pada layanan wisatawan selama di destinasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguraikan kondisi faktual bentuk-bentuk akomodasi yang ada di Wakatobi dan Bulukumba melalui kajian atau studi perbandingan (komparatif); 2) merekomendasikan usulan pengelolaan usaha akomodasi dalam konteks peran pelaku pariwisata di destinasi tersebut. Studi kualitatif (tahun 2018) dengan kunjungan ke dua daerah tersebut memberikan informasi mengenai kondisi faktual sesuai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah-istilah akomodasi oleh pengusaha di Wakatobi dan Bulukumba cenderung tidak dipahami secara mendalam. Penamaan jenis akomodasi semata-mata hanya didasarkan pada keinginan atau kemauan pengusaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penataan kembali akomodasi yang ada dengan menekankan kejelasan pengelolaan dan jenis layanan yang diberikan berdasarkan jenis akomodasi. Peran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait (stakeholder) sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan usaha akomodasi tersebut. Optimalisasi fungsi kelembagaan dan dorongan ke masyarakat untuk membuka usaha pariwisata alternatif bagi masyarakat menjadi hal penting untuk Wakatobi dan Bulukumba.

**Kata kunci:** Akomodasi wisata, homestay, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Wakatobi

## **PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan aktifitas kompleks karena tidak hanya melibatkan satu jenis industri, tetapi melibatkan berbagai jenis usaha pariwisata dan kelompok masyarakat. Konsumsi layanan dan produk oleh wisatawan selama berada di destinasi wisata menjadikan pariwisata sebagai sektor penting dalam mendorong peningkatan ekonomi bagi masyarakat suatu destinasi. Masyarakat memberikan layanan kepada wisatawan melalui usaha pariwisata dan berbagai jenis layanan yang memungkinkan wisatawan dapat melakukan perjalanan dan menikmati aktifitas selama melakukan kegiatan pariwisata (Akbaba, 2012; Nowak, Petit dan Sahli, 2010; Stoeckl, 2008). Pariwisata telah dijadikan sebagai sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pencarian alternatif pendapatan. Hal ini ditunjukkan pada 2 (dua) destinasi yang menjual produk wisata bahari di kawasan timur Indonesia yakni Kabupaten Wakatobi (Provinsi Sulawesi Tenggara) dan Kabupaten Bulukumba (Provinsi Sulawesi Selatan).

Salah satu usaha pariwisata yang banyak melibatkan masyarakat di dua destinasi tersebut adalah penyediaan layanan akomodasi bagi wisatawan ataupun pengunjung yang datang untuk tujuan rekreatif, wisata ataupun tujuan lainnya. Wakatobi menjadi pilihan wisatawan dengan salah satu tujuan untuk menikmati wisata bahari, sementara Bulukumba juga menjadi pilihan wisatawan untuk mendapatkan pengalaman wisata bahari dan budaya. Untuk menikmati pengalaman tersebut, maka akomodasi dengan berbagai jenis dan bentuknya menjadi kebutuhan wisatawan. Semakin banyaknya jumlah wisatawan yang masuk atau berkunjung ke destinasi, maka peluang untuk membuka usaha bidang akomodasi oleh masyarakat semakin besar. Sementara itu, usaha akomodasi dengan berbagai bentuknya akan bermunculan seiring dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan melalui penyediaan jasa layanan akomodasi.

Namun demikian, terdapat kecenderungan bahwa usaha akomodasi yang dibangun oleh masyarakat hanya didasarkan pada pemanfaatan peluang untuk mendapatkan keuntungan (profit) semata. Idealnya, terdapat kesamaan persepsi dari berbagai kelompok masyarakat khususnya penyedia layanan akomodasi dalam memilih nama atau istilah yang digunakan dalam usaha akomodasi mereka. Kabupaten Wakatobi dan Bulukumba sebagai destinasi wisata dengan fokus wisata baharinya seharusnya menerapkan penggunaan istilah yang jelas dalam usaha akomodasi. Kenyataannya, berbagai jenis bentuk akomodasi dapat ditemukan di dua destinasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menguraikan kondisi faktual bentuk-bentuk akomodasi yang ada di Wakatobi dan Bulukumba melalui kajian atau studi perbandingan (komparatif); 2) merekomendasikan usulan pengelolaan usaha akomodasi dalam konteks peran pelaku pariwisata di destinasi tersebut.



## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Usaha Akomodasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah**

Wisatawan melakukan perjalanan untuk menikmati atau mengkonsumsi produk yang dimiliki suatu destinasi. Paduan elemen yang mendukung destinasi memungkinkan wisatawan mengkonsumsi produk destinasi tersebut (Meethan, 2004; Mrnjavac, Pavia dan Cerović, 2014). Penyedia layanan akomodasi misalnya, memberikan fasilitas akomodasi bagi wisatawan. Selain itu, kebutuhan makanan akan makan dan minum selama menginap dan berada di destinasi wisata dapat terpenuhi. Bahkan tidak sedikit hotel atau usaha akomodasi yang melakukan kerjasama dengan usaha lain, misalnya tenaga guide atau *travel agent* untuk memberikan pelayanan tur ke tempat-tempat wisata. Akumulasi pelayanan yang didapatkan oleh wisatawan serta keterlibatan dalam pemberian jasa atau layanan adalah bentuk aktifitas pariwisata. Dengan kata lain, industri pariwisata yang menjadi penyedia layanan yang memungkinkan manusia (wisatawan) melakukan perjalanan adalah salah satu bentuk atau defenisi pariwisata (Smith, 2004). Wisatawan melakukan perjalanan dengan berbagai tujuan dan jauh dari tempat tinggal asalnya serta aktifitas selama berada di destinasi menjadi ciri dari pariwisata atau kepariwisataan.

Wisatawan memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam memilih bentuk atau jenis akomodasi ketika mereka melakukan perjalanan. Kemudahan melakukan reservasi akomodasi dengan sistem internet menjadikan usaha akomodasi semakin meningkat (Meethan, 2012; Tussyadiah dan Pesonen, 2016). Hal ini menjadi alasan bahwa usaha akomodasi dengan berbagai bentuknya menjadi alternatif untuk membantu pengembangan pariwisata daerah. Untuk mendorong masyarakat mendirikan usaha pariwisata (salah satunya akomodasi), maka dibutuhkan pemahaman akan jenis atau bentuk-bentuk akomodasi yang akan dikelola termasuk ketepatan istilah yang digunakan.

Pemilihan wisatawan akan jenis atau bentuk akomodasi yang digunakan selama di destinasi wisata tidak terlepas dari harga yang ditawarkan. Menurut Tussyadiah dan Pesonen (2016), penurunan harga atau penggunaan dana bagi minimal bagi wisatawan ketika melakukan perjalanan menjadi salah satu alasan mengapa beberapa wisatawan memilih jenis atau bentuk akomodasi lainnya. Ini menjadi alasan bahwa selain hotel, terdapat jenis akomodasi lain yang dapat dikelola oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji istilah-istilah yang digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan usaha akomodasi.

## **Peran Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Pariwisata Dalam Usaha Akomodasi Wisata**

Menurut Gross dan Lashley (2014), salah satu bentuk peran penting dari masyarakat, penyedia layanan ataupun mereka yang masuk dalam kategori stakeholder pariwisata adalah memastikan bahwa keselamatan dan kenyamanan tamu selama menginap di suatu akomodasi dapat terjamin. Hal ini untuk memastikan bahwa tamu menginap dan mendapatkan pengalaman dengan jaminan keselamatan. Selain itu, penentuan jenis akomodasi yang digunakan tidak terlepas dari pengalaman yang mereka dapatkan sebelumnya.

Para stakeholder yang ada di suatu destinasi wisata selayaknya bekerja secara efektif dan menjalin kerjasama (Junaid dan D'Hauteserre, 2017; Leask, 2008). Leask menambahkan bahwa penyedia akomodasi, makanan dan minuman, organisasi atau kelompok tata kelola destinasi dan jasa transportasi seharusnya membangun kerjasama secara berkesinambungan. Menurut Prideaux (2008), ketersediaan berbagai produk pariwisata (misalnya akomodasi) adalah bagian dari produk infrastruktur. Infrastruktur fisik juga perlu didorong dengan meningkatkan kualitas transportasi, komunikasi, ketersediaan air, pelayanan kesehatan dan pelayanan yang berkaitan dengan regulasi dan perundang-undangan. Salah satu unsur stakeholder yang berperan dalam penyediaan dua jenis infrastruktur tersebut adalah pemerintah sebagai pendorong dan penentu kebijakan arah pengembangan pariwisata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dalam mengumpulkan informasi atau data penelitian sesuai tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini merupakan hasil kunjungan penelitian yang dilakukan pada bulan Maret hingga April tahun 2018. Kunjungan penelitian di Wakatobi difokuskan di wilayah atau pulau Wangi-Wangi dan Kaledupa sedangkan penelitian di Bulukumba difokuskan di kawasan wisata Tanjung Bira. Penelitian ini melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait di Wakatobi dan Bulukumba melalui kegiatan wawancara mendalam serta observasi langsung (observasi lapangan) di lokasi penelitian.

Wawancara dibutuhkan untuk mendengarkan secara langsung pendapat atau persepsi para informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Informan di Wakatobi adalah masyarakat, pelaku pariwisata dan pemerintah sedangkan informan di Bulukumba adalah masyarakat penjaga atau pemberi layanan akomodasi. Observasi difokuskan pada kondisi faktual bentuk-bentuk akomodasi yang ada di lokasi penelitian. Catatan lapangan membantu peneliti dalam menuliskan hasil observasi penelitian sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dengan menerapkan prinsip analisis data



kualitatif melalui proses membandingkan data-data kualitatif di dua lokasi penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk-Bentuk Akomodasi di Wakatobi dan Bulukumba**

Kabupaten Wakatobi telah menjadi sepuluh destinasi prioritas (*ten-top priority destination*) melalui keputusan atau kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi masyarakat daerah tersebut untuk mengembangkan usaha akomodasi. Pulau Wangi-Wangi merupakan daerah Wakatobi yang memiliki akomodasi dengan varian hotel, penginapan dan homestay. Pulau Wangi-Wangi merupakan destinasi utama para wisatawan sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke pulau-pulau lainnya di Wakatobi. Karena itu, keberadaan usaha akomodasi di Pulau Wangi-Wangi menjadi realita dan salah satu alternatif pendapatan masyarakat setempat.

Eksplorasi di Pulau Wangi-Wangi menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa hotel yang dimanfaatkan oleh wisatawan selama melakukan kunjungan. Peneliti memanfaatkan kunjungan ke Wakatobi dengan menginap di hotel Wakatobi, hotel darma dan hotel ArRafiq. Ketiga hotel ini menjadi pilihan bagi kebanyakan wisatawan. Hotel wakatobi adalah salah satu usaha akomodasi tertua di Wakatobi. Dalam pengelolaannya, hotel-hotel tersebut menerapkan prinsip manajemen hotel sebagaimana usaha akomodasi hotel umumnya. Di daerah ini pula terdapat jenis penginapan dengan bentuk pelayanan kamar yang diperuntukkan bagi wisatawan atau pengunjung. Jika dilihat dari kamar yang disediakan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat berupaya membuka usaha akomodasi berdasarkan pemahaman mereka. Penggunaan istilah penginapan sebagai bentuk akomodasi tidak terlepas dari kesadaran masyarakat bahwa usaha akomodasi mereka belum layak dikatakan sebagai hotel.

Terdapat anggota masyarakat yang cenderung menggunakan istilah penginapan, rumah kost ataupun penginapan tanpa memahami dengan jelas perbedaan dan pengelolaan istilah-istilah atau bentuk akomodasi tersebut. Wawancara dengan masyarakat pelaku pariwisata yang saat ini (pada saat penelitian dilakukan) akan membuka usaha akomodasi dalam bentuk homestay. Ketika rampung, informan tersebut akan menggunakan istilah homestay, bukan penginapan ataupun rumah kost. Dalam hal definisi operasional homestay, maka usaha yang sedang dirintisnya dapat dikategorikan sebagai rumah kost ataupun penginapan. Usaha tersebut terdiri dari empat kamar yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung atau wisatawan untuk menginap. Kenyataannya, terdapat usaha akomodasi yang

menggunakan istilah wisma, istilah yang berbeda dari berbagai bentuk akomodasi lainnya.

Sesungguhnya, istilah akomodasi tersebut cenderung digunakan berdasarkan keinginan dari masyarakat atau pengusaha semata. Sementara, argumentasi mengapa istilah tersebut digunakan didasarkan pada keputusan pemilik usaha akomodasi yang bersangkutan. Namun, di beberapa wilayah di Pulau Wangi-Wangi, penggunaan istilah homestay dapat dikatakan sudah tepat. Pengelolaan homestay dilihat dari pemanfaatan kamar oleh masyarakat di dalam satu rumah yang diperuntukkann untuk pengunjung. Di Desa Waha, pemanfaatan kamar rumah dalam bentuk homestay telah mampu mendorong masyarakat memahami makna dan arti pariwisata serta manfaatnya bagi masyarakat setempat. Meskipun perlu usaha mengoptimalkan manfaat pengelolaan usaha homestay bagi masyarakatnya,

Di pulau Kaledupa, masyarakat telah mulai disadarkan dengan keinginan untuk membuka usaha akomodasi dalam bentuk homestay. Peneliti mendapat kesempatan untuk menginap di sebuah homestay yang disediakan oleh masyarakat Kaledupa. Bagi masyarakat, keberadaan penginapan MM yang dikelola oleh masyarakat merupakan pilihan bagi wisatawan yang datang ke Pulau Kaledupa. Karena itu, masyarakat setempat merekomendasikan peneliti untuk menginap di penginapan MM. Kunjungan ke Pulau Hoga yang tidak jauh dari Pulau Kaledupa memberikan informasi penting mengenai pengelolaan usaha akomodasi oleh masyarakat.

Di Pulau tersebut, istilah homestay lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk merujuk pada tempat menginap bagi wisatawan. Dalam konteks pengelolaan, homestay yang ada di pulau tersebut lebih tepat menggunakan istilah penginapan. Jika dilihat dari bentuk dan perbedaan pengelolaan dengan homestay, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat belum memahami bagaimana suatu usaha akomodasi dikategorikan sebagai homestay atau penginapan. Varian penggunaan istilah-istilah bentuk penginapan lebih dititik beratkan pada istilah yang lebih populer di telinga mereka. Pulau Hoga di Kaledupa banyak menggunakan istilah homestay yang berarti bahwa istilah tersebut lebih populer di masyarakat dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya.

Bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba, usaha akomodasi menjadi pilihan penting bagi pemenuhan peningkatan ekonomi masyarakatnya. Penelitian di kawasan wisata Tanjung Bira menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis bentuk usaha akomodasi yang ditawarkan oleh pengusaha akomodasi ataupun masyarakat Kabupaten Bulukumba. Berbagai istilah atau nama digunakan untuk menunjukkan penginapan yang diperuntukkan untuk tamu yang datang ke Tanjung Bira. Jenis usaha penginapan yang ada di Tanjung Bira adalah hotel, wisma, homestay, penginapan, cottage, guest



house dan pondok wisata. Kawasan Tanjung Bira banyak didominasi oleh usaha akomodasi dengan berbagai jenis nama dan bentuk.



Gambar 1 dan 2.  
Jenis akomodasi di Tanjung Bira, Bulukumba  
Foto oleh: Peneliti, 2018

Terdapat kecenderungan bahwa usaha akomodasi yang ada di kawasan Tanjung Bira mengalami pasang surut. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa akomodasi yang kurang terawat dengan baik, bahkan cenderung tidak buka selama periode tertentu. Sebaliknya, tidak sedikit hotel atau akomodasi lainnya yang tetap menjalankan usahanya dan mendapatkan tamu. Wawancara dengan pengelola hotel menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah tamu saat ini dibandingkan masa-masa lampau ketika Tanjung Bira dikenal sebagai destinasi wisata yang indah dan menarik. Kreatifitas ataupun upaya inovatif nampaknya menjadi suatu keharusan bagi pengelola usaha akomodasi jika ingin bertahan di tengah persaingan pembangunan penginapan yang ada di Tanjung Bira.

### **Peran Pemerintah dan Stakeholder Pariwisata Dalam Penataan Usaha Akomodasi**

Pemerintah menjadi unsur penting dalam pengelolaan dan penataan usaha akomodasi di setiap destinasi wisata. Untuk wilayah Wakatobi, kebijakan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti di tingkat pemerintah lokal menjadi peluang yang besar bagi pengelolaan usaha akomodasi. Pemerintah daerah melalui peran Dinas Pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten memiliki andil yang besar dalam pengelolaan usaha akomodasi. Usaha akomodasi yang dikelola rakyat kecil, misalnya homestay, saat ini

membutuhkan bantuan pemerintah mengingat jumlah wisatawan yang memanfaatkan akomodasi berupa homestay sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat mengingat homestay adalah bentuk usaha kecil yang pro-poor dan pro-rakyat. Dengan kata lain, pemerintah perlu mendukung masyarakat yang menjalankan usaha homestay dengan pemberian peluang atau kesempatan bagi tamu untuk menginap di homestay selain jenis atau bentuk akomodasi lainnya.

Komitmen pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata di Kabupaten Bulukumba terbukti mampu mengangkat kawasan Tanjung Bira sebagai salah satu destinasi unggulan Sulawesi Selatan. Penataan usaha akomodasi di Tanjung Bira seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah. Banyaknya dan maraknya pertumbuhan usaha akomodasi dengan berbagai bentuknya di daerah tersebut menjadi salah satu penyebab ketidakjelasan istilah akomodasi yang digunakan oleh masyarakat. Idealnya, pemerintah memberikan batasan atau aturan penggunaan istilah yang telah atau akan dibangun oleh pengusaha akomodasi. Pemerintah menjadi aktor kunci dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penentuan suatu akomodasi dikategorikan sebagai hotel, penginapan, cottage, ataupun jenis-jenis akomodasi lainnya.

Argumentasi dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah seharusnya mengatur masyarakat atau memberikan rambu-rambu, regulasi ataupun petunjuk penggunaan istilah-istilah dalam mengelola akomodasi. Regulasi ini juga terkait dengan bagaimana atau seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau pengusaha akomodasi. Jika dilihat dari bentuk akomodasi yang ada di Tanjung Bira, maka tidak ada perbedaan antara penginapan biasa, cottage, hoemesta, wisma, hotel ataupun penginapan lainnya jika dilihat dari pengelolaan kamarnya. Hal ini perlu diatur melalui kebijakan pemerintah dan pemberian informasi spesifik dan berkelanjutan ke masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat, wisatawan dan pengguna jasa pariwisata mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana bentuk pelayanan yang standar di suatu destinasi wisata.

### **Homestay dan Alternatif Usaha Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Di Kabupaten Wakatobi, usaha akomodasi telah mulai berkembang seiring dengan eksistensi hotel yang ada di daerah tersebut. Penentuan Wakatobi sebagai destinasi prioritas di Indonesia juga memberi pengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk membuka usaha di bidang pariwisata. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa jenis-jenis usaha akomodasi yang ada di pulau-pulau di Wakatobi merupakan indikator meningkatnya minat masyarakat dalam membuka usaha akomodasi. Meskipun dalam dua tahun terakhir jumlah tamu yang menggunakan jasa akomodasi mengalami



penurunan, masyarakat masih perlu didorong untuk menjalankan usaha pariwisata dengan berbagai bentuk usaha.

Wawancara dengan karyawan hotel di pulau Wangi-Wangi menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan tamu yang menginap di hotel tempat dia bekerja mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Wakatobi. Tamu yang menginap di hotel akan semakin meningkat jika dibarengi dengan kegiatan event yang mampu mendatangkan tamu atau wisatawan ke Wakatobi. Pelaksanaan event yang bersifat nasional ataupun internasional memberikan keuntungan atau manfaat tersendiri bukan hanya pada pengusaha hotel atau akomodasi di Wakatobi, tetapi juga pada usaha pariwisata lainnya, misalnya penyewaan kendaraan, usaha penyediaan makanan atau warung-warung makanan yang tersebar di daerah Wangi-Wangi.

Homestay sangat dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman tinggal bersama masyarakat lokal. Di beberapa wilayah di Wangi-Wangi, terdapat homestay yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk menginap. Dalam konteks penggunaan istilah homestay, usaha homestay di daerah Raha misalnya, sudah dijalankan sesuai dengan fungsi dan tujuan homestay. Usaha-usaha homestay untuk wilayah Wakatobi menjadi salah satu peluang untuk membantu masyarakat mendapatkan manfaat kedatangan wisatawan ke Wakatobi. Namun, usaha homestay ini terkadang tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat karena kurang atau bahkan tidak ada tamu yang menginap di homestay yang telah disediakan oleh masyarakat. Hal yang sama juga ditunjukkan di pulau Kaledupa dimana homestay menjadi pilihan bagi wisatawan ketika berkunjung ke daerah ini. Namun, kamar yang disediakan oleh masyarakat untuk kepentingan penginapan tidak dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi penyedia kamar jika tidak ada tamu yang datang. Kecenderungannya adalah penginapan menjadi pilihan bagi wisatawan dibandingkan homestay.

Kondisi di atas perlu diatasi dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha lain yang dapat mendukung mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kelembagaan yang telah terbentuk di Wakatobi untuk memberikan pelatihan dan pembantuan bagi masyarakat. Lembaga-lembaga bidang kepariwisataan yang ada, misalnya forum tata kelola pulau, komunitas masyarakat pariwisata dan kelompok sadar wisata perlu mendampingi masyarakat untuk membuka usaha-usaha kreatif yang bersifat berkelanjutan. Masyarakat di daerah-daerah yang terdapat daya tarik wisata khususnya wisata bahari perlu didampingi untuk menciptakan peluang

bisnis yang aplikatif, tidak hanya pemberian pelatihan yang bersifat sementara.

Masyarakat di kawasan wisata Tanjung Bira Bulukumba juga memerlukan pemahaman tentang usaha pariwisata kreatif. Jenis dan bentuk akomodasi yang ada di kawasan wisata sesungguhnya dikelola atau dimiliki oleh kalangan masyarakat yang memiliki modal yang tidak sedikit. Istilah homestay yang ada di kawasan Tanjung Bira belum dapat dikategorikan sebagai homestay. Umumnya, tempat-tempat akomodasi di kawasan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan profit melalui penyediaan lahan dalam bentuk penginapan. Dengan kata lain, usaha homestay untuk kawasan Tanjung Bira mungkin tidak dapat menjadi pilihan mengingat masyarakat lebih menyulap rumah mereka sebagai penginapan dengan berbagai jenis nama dan bentuknya.

Usaha homestay dapat dikembangkan oleh masyarakat yang tinggal di luar kawasan wisata Tanjung Bira. Jika pengunjung harus membayar jika ingin masuk ke kawasan tersebut, maka pengunjung yang memanfaatkan homestay yang dikelola oleh masyarakat tidak perlu membayar. Namun, hal ini menjadi dilematis mengingat pusat daya tarik wisata Tanjung Bira agak jauh dari homestay yang dikelola oleh masyarakat tersebut. Keuntungan yang dapat dirasakan oleh pengunjung atau tamu adalah harga homestay yang relatif lebih murah dibandingkan dengan penginapan di kawasan wisata tersebut. Penelitian ini memandang bahwa perlu kajian dan pemberian pemahaman bagi masyarakat yang ingin menyiapkan kamarnya sebagai usaha homestay.

Selain akomodasi, masyarakat dapat didorong untuk memanfaatkan eksistensi Tanjung Bira sebagai daya tarik wisata untuk mendapatkan manfaat ekonomis. Terdapat tiga peluang usaha kreatif yang dapat dijalankan. Pertama, usaha pusat souvenir kreatif yang merupakan karya masyarakat Kabupaten Bulukumba. Saat ini, terdapat penjual souvenir di sekitar pantai Tanjung Bira yang melibatkan masyarakat sebagai penjual souvenir. Namun, peluang untuk membuka pusat oleh-oleh bagi tamu di sekitar kawasan luar Tanjung Bira dapat menjadi peluang usaha bagi mereka yang memiliki modal. Peluang ini hanya dapat dijalankan jika ada keinginan untuk meningkatkan kualitas souvenir dengan harga yang terjangkau.

Kedua, masyarakat penyedia layanan wisata bahari di Tanjung Bira (misalnya, perahu penyeberangan) telah mendapat keuntungan ekonomis dari jasa penyeberangan dan aktifitas rekreatif bagi wisatawan. Namun, keberlanjutan Tanjung Bira sebagai daya tarik wisata perlu didukung dengan kesediaan para penyedia layanan tersebut menjalankan aktifitas yang dapat melindungi atau melestarikan lingkungan. Penggunaan jangkar ketika menambatkan perahu ketika mengantar tamu ke pulau perlu dihindari dengan



pengawasan kepada masyarakat tersebut. Ketiga, masyarakat di sekitar atau di luar kawasan Tanjung Bira dapat mendirikan lembaga pariwisata yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjalankan aktifitas kepariwisataan. Kabupaten Wakatobi dapat menjadi contoh bagaimana fungsi kelembagaan dapat membantu masyarakat memahami pariwisata.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini merupakan kajian komparatif antara Kabupaten Wakatobi dan Bulukumba dilihat dari perspektif usaha akomodasi yang ada di wilayah tersebut. Wakatobi sebagai salah satu destinasi prioritas telah memiliki akomodasi yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan. Meskipun wilayah ini merupakan destinasi baru, namun potensi wisata yang dimiliki menjadikan wisatawan datang ke daerah ini untuk tujuan wisata bahari dan berbagai tujuan lainnya. Usaha homestay menjadi pilihan masyarakat selain bentuk penginapan lain (misalnya hotel, penginapan, wisma). Namun, penggunaan istilah-istilah akomodasi oleh pengusaha dan masyarakat cenderung tidak dipahami dengan jelas di kedua wilayah tersebut (Wakatobi dan Bulukumba). Di kawasan Tanjung Bira, penamaan jenis akomodasi semata-mata hanya didasarkan pada keinginan atau kemauan pengusaha. Pengelola sebagai orang yang menjalankan usaha tersebut juga tidak memahami mengapa istilah tersebut digunakan.

Pengelolaan usaha akomodasi di Indonesia khususnya kawasan Timur Indonesia perlu ditata dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan bahwa penataan yang bersifat non fisik berupa pemberian pemahaman ke masyarakat akan makna akomodasi dan bentuk-bentuk pelayanannya perlu diterapkan. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk tidak hanya memandang akomodasi sebagai satu-satunya usaha yang dapat dijalankan, tetapi terdapat berbagai bentuk usaha lain yang dapat memberi manfaat positif bagi masyarakatnya. Pemerintah Wakatobi perlu memaksimalkan fungsi kelembagaan yang telah terbentuk. Sementara itu, pemerintah daerah Bulukumba perlu didukung dalam upaya menata sistem akomodasi yang ada di Tanjung Bira.

## **Daftar Pustaka**

- Akbaba, A. (2012). Understanding small tourism businesses: a perspective from Turkey. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 19, 61-77.
- Gross, M. J., & Lashley, C. (2014). Hospitality higher education: a multidisciplinary approach to liberal values, hospitality and hospitableness. Dalam D. Dredge, D. Airey & M. J. Gross (Eds.), *The*

- routledge handbook of tourism and hospitality education* (pp. 73-84). London: Routledge.
- Junaid, I., & Anne-Marie, d. H. (2017). Collaborative schemes for anticipating negative impacts of the tourists' visit. *Tourism and Hospitality Management*, 23(2), 279-294. doi: <https://doi.org/10.20867/thm.23.2.8>
- Leask, A. (2008). The nature and role of visitor attractions. Dalam A. Fyall, B. Garrod & A. Leask (Eds.), *Managing visitor attractions: New directions, 2nd edition* (pp. 3-15). Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Meethan, K. (2012). Tourism, individuation and space. Dalam J. Wilson (Ed.), *The routledge handbook of tourism geographies* (pp. 61-66). Oxon: Routledge.
- Mrnjavac, E., Pavia, N., & Cerović, M. (2014). Logistics In Providing Private Accommodation Services In Primorsko – Goranska County. *Tourism and Hospitality Management*, 20(2), 235-249.
- Nowak, J.-J., Petit, S., & Sahli, M. (2010). Tourism and globalization: The international division of tourism production. *Journal of Travel Research*, 49(2), 228-245.
- Prentice, R. (2004). Tourist motivation and typologies. Dalam A. A. Lew, C. M. Hall & A. M. Williams (Eds.), *A companion to tourism* (pp. 261-279). Malden: Blackwell.
- Prideaux, B. (2008). The role of visitor attractions in peripheral areas. Dalam A. Fyall, B. Garrod & A. Leask (Eds.), *Managing visitor attractions: New directions, 2nd edition* (pp. 80-94). Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Smith, S. L. J. (2004). The Measurement of Global Tourism: Old Debates, New Consensus, and Continuing Challenges. Dalam A. A. Lew, C. M. Hall & A. M. Williams (Eds.), *A companion to tourism* (pp. 25-35). Malden: Blackwell.
- Stoeckl, N. (2008). Enhancing the economic benefits of tourism at the local level. In G. Moscardo (Ed.), *Building community capacity for tourism development* (pp. 16-28). Wallingford: CABI.
- Tussyadiah, I. P., & Pesonen, J. (2016). Impacts of peer-to-peer accommodation use on travel patterns. *Journal of Travel Research*, 55(8), 1022–1040. doi: DOI: 10.1177/0047287515608505